

Sumber Pembiayaan Pendidikan Di Era Otonomi Sekolah

Abd. Hamid, H. Abdul Jalil

Dosen Jurusan Pendidikan Agama Islam (PAI)

STAI An-Nadwah Kuala Tungkal

email : abdulhamidsyahrul2@gmail.com

Abstrak

Pembiayaan pendidikan menjadi salah satu faktor yang sangat menentukan dalam keberlangsungan pendidikan, sehingga dapat memenuhi standar kualitas pendidikan nasional. Terdapat berbagai macam komponen di dalam pembiayaan pendidikan. Umumnya dihitung dari biaya nyata (*Real Cost*) atau biasanya disebut *Money Cost*, seperti *Capital Cost* atau *Durable Asset* dan *Recurrent Cost* atau biaya operasional. Adapun biaya peluang atau *Opportunity Cost* sebagai biaya yang harus dibayar, misalnya memilih studi dari pada bekerja tidak pernah dihitung. Penghitungan biaya pendidikan meliputi antara lain *Total Cost* yang mencakup *Fixed Cost* dan *Variable Cost*, *unit Cost* per program studi atau per siswa atau mahasiswa, *Average Cost*, dan *Marginal Cost*. Berbagai macam jenis biaya tersebut tentunya mempunyai bermacam karakteristik yang berbeda-beda.

Kata kunci ; *Capital Cost, Recurrent Cost, Opportunity Cost, Biaya Pendidikan*

PENDAHULUAN

Dalam penyelenggaraan pendidikan terutama di sekolah, baik di tingkat Sekolah Dasar, Sekolah Menengah ataupun di tingkat Pendidikan Tinggi, biaya tidak dapat diabaikan, karena tanpa biaya proses pendidikan di sekolah tidak akan berjalan dengan baik dan lancar. Pada satuan pendidikan terutama di tingkat sekolah, biaya pendidikan diperoleh dari subsidi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, iuran siswa dan sumbangan masyarakat .

Sementara biaya pendidikan yang cukup besar dalam masyarakat industri modern berasal dari orang tua, masyarakat, dan dunia industri. Orang tua akan menyadari dan menanggung biaya pendidikan (SPP) yang lebih riil, sedangkan dari sektor pemerintah kemungkinan melalui pajak pendidikan. Dari masyarakat dapat berupa sumbangan, begitu pula dari dunia industri, misalnya untuk melakukan penelitian.

Menurut Nanang, lembaga pendidikan atau sekolah pada umumnya tidak langsung menanggung seluruh biaya, karena gaji guru dan sarana pendidikan dominan bersumber dari pemerintah untuk Sekolah Negeri ataupun dari yayasan untuk Sekolah Swasta. Sedangkan uang pemerintah sebagian dari masyarakat melalui pembebasan wajib pajak. Pajak yang dibayar oleh masyarakat dipandang sebagai biaya tidak langsung. Oleh karena itu, pendidikan dapat dipandang sebagai aktivitas yang bersifat pelayanan umum.¹

Pembiayaan adalah kemampuan internal sistem pendidikan untuk mengelola dana-dana pendidikan secara efisien. Pembiayaan pendidikan tidak hanya menyangkut analisa sumber saja, akan tetapi juga menggunakan dana-dana secara efisien.² Dalam dunia pendidikan saat ini telah menghadapi banyak permasalahan dan hambatan. Salah satu permasalahan klasik yang selalu dihadapi dunia pendidikan adalah mengenai sumber dana atau pembiayaan yang sangat minim sekali, sekalipun anggaran pendidikan yang telah direncanakan belum memenuhi target atau masih sangat kecil seperti yang diharapkan dari seluruh pendapatan dari APBN kita, termasuk untuk alokasi dana pendidikan dari anggaran APBD yang juga masih sangat kecil bila kita kaitkan dengan penting dan besarnya biaya pendidikan yang ada saat ini.

PEMBAHASAN

A. Konsep Dasar Pembiayaan Pendidikan

Pembiayaan pendidikan adalah sebagai nilai rupiah dari seluruh sumber daya (Input) yang digunakan untuk suatu kegiatan pendidikan. Pembiayaan adalah kemampuan interval sistem pendidikan untuk mengelola dana-dana pendidikan secara efisien. Pembiayaan pendidikan tidak hanya menyangkut analisa sumber saja, akan tetapi juga menggunakan dana-dana secara efisien. Semakin efisien sistem pendidikan itu makin kurang pula dana

¹ Fatah, Nanang. *Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan*. Bandung. Remaja Rosdakarya. 2000. Hlm. 4.

² Ibid. Hlm. 110

yang diperlukan untuk mencapai tujuan-tujuannya dan karena itu lebih banyak dicapai dengan anggaran yang tersedia.³

Biaya pendidikan merupakan salah satu komponen masukan *Instrumental* yang sangat penting bagi penyelenggaraan pendidikan.⁴ Hampir tidak ada upaya pendidikan yang mengabaikan peranan biaya, sehingga dapat dikatakan tanpa biaya, proses pendidikan tidak dapat berjalan. Biaya pendidikan merupakan dasar empiris untuk memberikan gambaran karakteristik sekolah. Analisis efisiensi keuangan sekolah dalam pemanfaatan sumber-sumber keuangan sekolah dari hasil (*Output*) sekolah dapat dilakukan dengan menganalisa biaya satuan persiswa. Biaya rata-rata persiswa di hitung dari total pengeluaran sekolah dalam kurun waktu tertentu. Dengan mengetahui besarnya biaya satuan peristiwa menurut jenis dan jenjang pendidikan berguna untuk menilai berbagai alternatif kebijakan dalam peningkatan mutu pendidikan.⁵

Pembiayaan sebagai salah satu komponen sistem pendidikan memerlukan kajian yang lebih mendalam dan penelitian yang lebih cermat supaya untuk menggunakan dana-dana yang tersedia secara tepat, untuk satu pengeluaran pendidikan yang tidak dapat terhindar, *Intern* pada hasil dan dapat digunakan sebelumnya yang tepat dan sebenar-benarnya sehingga akan terlihat secara langsung pengaruhnya. Penegasan diatas mengisyaratkan bahwa aspek-aspek kualitas maupun kuantitas pendidikan dapat diterangkan dari konsep pembiayaan. Hal ini berarti bahwa dalam kondisi ideal, ketersediaan biaya yang memadai dengan manajemen pembiayaan yang lebih baik dapat menyumbangkan peningkatan hasil pendidikan baik dilihat dari jumlah maupun mutunya.

B. Penyusunan Anggaran Pembiayaan Pendidikan

Suatu lembaga pendidikan sebagai produsen jasa pendidikan secara teoritis menimbulkan konsep biaya yang sama dengan bidang-bidang

³ Supriadi, Dedi. *Satuan Biaya Pendidikan*. Bandung. Remaja Rosdakarya. 2004, Hlm. 4.

⁴ Ibid. Hlm. 6.

⁵ Fatah, *Ekonomi dan Pembiayaan....*, Hlm. 24.

aktivitas lainnya. Dana atau biaya pendidikan merupakan faktor yang penting dalam menghasilkan siswa yang berkualitas disuatu lembaga pendidikan (sekolah). Artinya lembaga pendidikan tersebut memerlukan dana yang akan dipergunakan dalam berbagai keperluan, yaitu untuk gaji tenaga pendidikan lainnya, gaji tenaga administrasi, biaya pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana (ruang belajar, ruang laboratorium, perpustakaan, gedung dan fasilitas lainnya) serta biaya penyelenggaraan pendidikan, perluasan dan pengembangannya.

Penyusunan anggaran merupakan langkah-langkah positif untuk dapat merealisasikan penggunaan pembiayaan. Kegiatan ini melibatkan pimpinan tiap-tiap unit organisasi. Pada dasarnya, penyusunan anggaran merupakan negosiasi atau perundingan atau kesepakatan antara pucuk pimpinan dengan bawahannya untuk menentukan besarnya alokasi biaya untuk suatu penganggaran. Hasil akhir dari suatu negosiasi merupakan suatu pernyataan tentang pengeluaran dan pendapatan yang diharapkan dari sumber dana. Dalam penyusunan anggaran pada setiap harus didasari oleh konsep perencanaan, baik perencanaan pendapatan maupun perencanaan pembiayaan untuk aktivitas yang akan dijalankan pada unit-unit lembaga.

Perencanaan yang dimaksudkan adalah suatu pemikiran tentang rencana kerja yang akan dilakukan. Bentuk dan tahapan pelaksanaannya dapat berjalan menurut garis yang sudah ditentukan, artinya jelas sasaran dan tujuannya. Dalam konteks perencanaan pembiayaan, untuk merencanakan pembiayaan secara seimbang, harmonis dengan menentukan ukuran-ukuran segala sesuatu mengenai rencana pembiayaan secara akurat pula. Secara logis suatu aktivitas haruslah di mulai dengan suatu perencanaan yang akurat guna menghindari kesalahan dan kekeliruan.

1. Karakteristik Anggaran

Pembiayaan pendidikan dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003, pasal 46 ayat 1 menyatakan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat. Kemudian ayat 2 pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung

jawab menyediakan anggaran pendidikan sebagaimana diatur dalam pasal 31 ayat 4 Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945.⁶

Secara umum pembiayaan pendidikan dibedakan menjadi dua jenis, yaitu biaya rutin atau *Recurring Cost* dan biaya modal atau *Capital Cost*. *Recurring Cost* pada intinya mencakup keseluruhan biaya operasional penyelenggaraan pendidikan, seperti biaya administrasi, pemeliharaan fasilitas, pengawasan, gaji, biaya untuk kesejahteraan, dan lain-lain. Sementara *Capital Cost* atau sering pula disebut biaya pembangunan mencakup biaya untuk pembangunan fisik, pembelian tanah, dan pengadaan barang-barang lainnya yang didanai melalui anggaran pembangunan.⁷

Pembiayaan pendidikan meliputi (1) biaya mutasi, (2) biaya personal (3) biaya operasional. Sumber dana ini dari APBN dan APBD. Disamping itu terdapat juga sumber dana seperti BOS, dana ini berasal dari pengurangan subsidi BBM, komite sekolah, dan dana dari masyarakat atau orang tua murid. Sekolah swasta mendapatkan dana dari uang pembangunan, subsidi pemerintah, SPP, komite sekolah dan donator.⁸

2. Fungsi Anggaran

Penganggaran disamping sebagai alat untuk merencanakan dan pengendalian, juga merupakan alat bantu bagi manajemen dalam mengarahkan suatu lembaga untuk menempatkan suatu organisasi pada posisi yang kuat dan lemah. Karena itu, anggaran juga berfungsi sebagai tolak ukur keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Disamping itu, anggaran dapat pula dijadikan alat untuk mempengaruhi dan memotivasi pimpinan dan karyawan untuk bersifat efisien dalam mencapai sasaran-sasaran lembaga.

3. Prinsip dan Prosedur Penyusunan Anggaran

⁶ Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003, Sinar Grafika Jakarta. Hlm. 23.

⁷ Danim, Sudarwan. *Visi baru Manajemen Sekolah : Dari Unit Birokrasi ke Lembaga Akademik*. Jakarta. Bumi Aksara. 2006. Hlm. 145.

⁸ Yamin, Martinis. *Profesionalisasi Guru dan Implementasi KTSP*. Gaung Persada Press Jakarta. 2007. Hlm. 88-89.

Apabila anggaran difungsikan sebagai alat dalam perencanaan maupun pengendalian, maka anggaran harus disusun berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut :

- a. Adanya pembagian wewenang dan tanggung jawab yang jelas dalam sistem manajemen dan organisasi.
- b. Adanya sistem akuntansi yang memadai dalam melaksanakan anggaran.
- c. Adanya penelitian dan analisis untuk mengetahui efektifitas kinerja organisasi.
- d. Adanya dukungan dari pelaksanaan mulai dari atas sampai ke bawah.⁹

Persoalan penting dalam penyusunan anggaran adalah bagaimana memanfaatkan dana secara efisien, mengalokasikan secara tepat dan memperhitungkan skala prioritas. Karena itu, prosedur penyusunan anggaran memerlukan tahapan yang sistematis.

Tahapan prosedur penyusunan anggaran adalah sebagai berikut:

- a. Mengidentifikasi program kerja yang akan dilakukan dalam periode anggaran.
- b. Mengidentifikasi anggaran dalam bentuk formatting.
- c. Memformulasikan anggaran dalam bentuk formatting.
- d. Mengusulkan anggaran untuk memperoleh persetujuan dari yang berwenang.
- e. Melakukan revisi anggaran.
- f. Persetujuan revisi usulan anggaran.
- g. Pengesahan anggaran.¹⁰

Perlu diketahui bahwa dalam organisasi skala kecil, biasanya di susun oleh staf pimpinan atau atasan dari suatu bagian, sedangkan dalam skala besar, penyusunan anggaran diserahkan kepada bagian, seksi atau komisi anggaran yang secara khusus merancang anggaran.

⁹ Fatah, *Ekonomi dan Pembiayaan* Hlm. 50.

¹⁰ Mukhtar, dkk. *Sekolah Berprestasi*. Jakarta. Nimas Multima. 2003. Hlm. 51.

C. Sumber Biaya Pendidikan

Kategori pembiayaan pendidikan sendiri terdiri dari beberapa bagian yaitu:

1. Biaya langsung terkait dengan penggajian guru, administrator staf sekolah, pembelian peralatan, materi pelajaran dan gedung sekolah. Biaya ini berasal dari APBN dan APBD. Dana pendidikan selain gaji dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari APBN pada sektor pendidikan minimal 20% dari APBD.¹¹
2. Biaya tidak langsung merupakan biaya penyusunan fasilitas pendidikan, perkiraan pendapatan jika sekiranya siswa bekerja secara produktif dan pajak pendidikan.
 - a. Biaya pendidikan adalah biaya yang dikeluarkan oleh para orang tua dalam menyekolahkan anaknya, perbandingan jika seandainya biaya tersebut diinvestasikan ke bidang usaha selain pendidikan.
 - b. Biaya sosial merupakan total dari keseluruhan biaya pribadi. Biaya ini dibiayai oleh publik.¹² Untuk dana sosial ini dapat dimanfaatkan sebagai :
 - 1) Dana rutin yaitu dana yang dipakai membiayai kegiatan rutin seperti tambahan gaji guru, pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat, biaya pemeliharaan dan lainnya.
 - 2) Dana pembangunan, ialah dana yang dipakai membiayai pembangunan-pembangunan dalam berbagai bidang seperti sarana dan prasarana, alat belajar, media dan sebagainya.

Di lihat dari sumber-sumbernya, biaya pendidikan pada tingkat makro berasal dari :

- a. Pendapatan Negara dari sektor pajak.
- b. Pendapatan dari sektor non pajak, misalnya dari pemanfaatan sumber daya alam dan produksi nasional lainnya.
- c. Keuntungan dari barang ekspor dan jasa

¹¹ Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003, Sinar Grafika Jakarta pasal 49

¹² Fatah, *Ekonomi dan Pembiayaan....*, Hlm. 24

- d. Usaha negara lainnya, termasuk investasi saham pada perusahaan negara atau BUMN.
- e. Bantuan dari bentuk hibah (*Grant*) dan pinjaman luar negeri (*Loan*) baik dari lembaga-lembaga keuangan internasional maupun pemerintah.¹³

D. Pengelolaan Biaya Pendidikan

Strategi suatu lembaga pendidikan dalam menggali biaya pendidikan secara administratif dengan bagaimana seseorang pemimpin melakukan upaya pengelolaan sumber daya dan sumber biaya yang terdapat di dalam lingkungan suatu lembaga pendidikan. Pengelolaan pendidikan harus mampu berusaha sebaik mungkin dalam mencari pemasukan keuangan guna memenuhi kebutuhan dalam pendanaan pendidikan. Sebagaimana orang-orang terdahulu yang telah bersusah payah dalam mencari keuangan pendidikan.

Strategi tersebut diatas dapat direalisasikan melalui penyelenggaraan berbagai kegiatan seperti :

- a. Melakukan analisis internal dan eksternal terhadap potensi sumber dana.
- b. Mengidentifikasi, mengelompokkan dan memperkirakan sumber-sumber dana yang dapat digali dan dikembangkan.
- c. Menetapkan sumber dana melalui :
 - 1) Musyawarah dengan orang tua didik pada awal tahun ajaran.
 - 2) Menggalang partisipasi masyarakat melalui komite sekolah.
 - 3) Menyelenggarakan kegiatan olahraga dan kesenian peserta didik untuk mengumpulkan dana dengan memanfaatkan fasilitas sekolah.¹⁴

Karena itu, pengaturan pembiayaan pendidikan berhubungan dengan keputusan-keputusan organisasi/lembaga, secara umum dapat dibedakan kedalam :

- a. Keputusan tentang alokasi dana ke berbagai macam aktivitas
- b. Keputusan optimalisasi sumber-sumber pemasukan yang berdasarkan aturan.
- c. Keputusan pemanfaatan yang efektif dan efisien untuk mencapai hasil yang maksimal.¹⁵

¹³ Anonim, *Memahami Paradigma Baru Pendidikan Nasional Dalam Undang-Undang RI*. Jakarta. 2003. Depag. Hlm. 13.

¹⁴ Supriadi, *Satuan Biaya....* Hlm. 23.

¹⁵ Ibid. Hlm. 26.

Dalam banyak kasus, keputusan yang benar dan wajar atau salah dapat dipertimbangkan secara wajar melalui analisis. Melakukan analisis dan mengambil keputusan-keputusan organisasi/lembaga merupakan tugas fungsional bagian keuangan.

Tugas fungsional bagian keuangan adalah mengambil keputusan yang dapat dibagi kedalam keputusan yang efektif dan tidak merugikan organisasi/lembaga. Untuk dapat melaksanakan tugas-tugas tersebut, seorang pengelola keuangan harus mengetahui empat aspek, yaitu :

- a. Berpedoman pada rencana anggaran yang tepat.
- b. Mengestimasi secara tepat nilai nominal sumber-sumber keuangan.
- c. Mencermati tentang pengaruh waktu dan ketidakpastian.
- d. Memperhitungkan efisiensi pengaruh waktu dan ketidakpastian.
- e. Memperhitungkan efisiensi pengeluaran secara cermat.¹⁶

E. Standar Pembiayaan Pendidikan

Menurut PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, pasal 62 tentang Standar Pembiayaan Pendidikan sebagai berikut:

1. Pembiayaan pendidikan terdiri atas biaya investasi, biaya operasi, dan biaya personal.
2. Biaya investasi satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumber daya manusia, dan modal kerja tetap.
3. Biaya personal sebagaimana di maksud pada ayat (1) meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan.
4. Biaya operasi satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji.
 - b. Bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan
 - c. Biaya operasi pendidikan tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dan lain sebagainya.

¹⁶ Ibid. Hlm. 26

5. Standar biaya operasi satuan pendidikan ditetapkan dengan Peraturan Menteri berdasarkan usulan BSNP.¹⁷

F. Pembiayaan Pendidikan dan Otonomi Sekolah

Pembiayaan pendidikan menjadi masalah yang sangat penting dalam keseluruhan pembangunan sistem pendidikan. Uang memang bukan segala-galanya dalam menentukan kualitas pendidikan, akan tetapi segala kegiatan pendidikan memerlukan uang. Oleh karena itu jika *Performance* sistem pendidikan diperbaiki, maka manajemen penganggarnya juga tidak akan mungkin dibiarkan, mengingat bahwa anggaran mesti mendukung kegiatan. Biaya pendidikan merupakan salah satu komponen masukan instrumental yang sangat penting dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Dalam setiap upaya pencapaian tujuan pendidikan baik tujuan-tujuan yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif, biaya pendidikan memiliki peranan yang sangat menentukan.

Menurut Supriadi, istilah biaya pendidikan sering kali dipadankan dengan pengeluaran pada pendidikan. Biaya pendidikan dalam cakupan ini memiliki pengertian yang luas, yaitu semua jenis pengeluaran yang berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan, baik dalam bentuk uang maupun barang dan tenaga (yang dinyatakan dengan satuan moneter).¹⁸

Biaya mengacu ke total biaya kesempatan suatu proyek (sumber daya sebenarnya digunakan) yang digunakan untuk perencanaan jangka panjang. Pengeluaran menunjukkan pada pembelian barang dan jasa, bangunan sekolah, perlengkapan dan lainnya. Pengeluaran valid untuk analisis alokasi. Seperti biaya pribadi yaitu biaya yang di korbakan oleh murid atau keluarganya, yang berupa biaya langsung (Fee, dikurangi rata-

¹⁷ Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang *Standar Nasional Pendidikan*, pasal 62 tentang Standar Pembiayaan Pendidikan

¹⁸ Supriyadi, Dedi. *Satuan Biaya Pendidikan Dasar dan Menengah*. Rujukan bagi Penetapan Kebijakan Pembiayaan Pendidikan Pada Era Otonomi dan Manajemen Berbasis Sekolah. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2006. Hlm. 3

rata nilai biasiswa jika menggunakan dana pemerintah, buku-buku, dsb) dan biaya tidak langsung (penghasilan yang hilang).¹⁹

Konsep biaya pendidikan ini dapat dibedakan dengan cara mengelompokkan biaya yang terjadi, yaitu (1) *Social and Private Cost*, (2) *Opportunity Cost and Money Cost*, and (3) *Explicit and Implicit Costs*.²⁰ Menurut Anwar dalam pendidikan dikenal beberapa kategori biaya pendidikan yaitu (1) biaya langsung (*Direct Cost*) dan biaya tidak langsung (*Indirect Cost*), (2) biaya pribadi (*Private Cost*) dan biaya sosial (*Social Cost*), dan (3) biaya dalam bentuk uang (*Monetary Cost*) dan bukan uang (*Non-Monetary Cost*).²¹ Dalam kenyataannya, pengkategorian biaya pendidikan tersebut dapat “bertumpang tindih”; misalnya ada biaya pribadi dan sosial yang bersifat langsung dan tidak langsung serta berupa uang dan bukan uang, dan ada juga biaya langsung dan tidak langsung serta biaya pribadi dan biaya sosial yang dalam bentuk uang maupun bukan uang.

Dari uraian di atas menunjukkan bahwa dalam upaya perbaikan mutu pendidikan pada tingkat satuan pendidikan (sekolah) atau mutu pendidikan pada umumnya, pemahaman yang serius terhadap berbagai aspek pembiayaan pendidikan sangat diutamakan. Pemahaman terhadap berbagai aspek pendidikan sangatlah penting diperhatikan untuk dapat mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan. Pemahaman yang dimaksud merentang dari hal-hal yang sifatnya mikro (satuan pendidikan) hingga yang makro (nasional), antara lain meliputi sumber-sumber pembiayaan pendidikan, sistem dan mekanisme pengalokasiannya, efektivitas dan efisiensi dalam penggunaannya, dan akuntabilitas hasilnya yang diukur dari perubahan-perubahan kuantitatif dan kualitatif yang terjadi pada semua tataran, khususnya tingkat sekolah.²²

¹⁹ G. Latchanna, dan Hussein, J. O. *Economics of Education*. New Delhi: Discovery Publishing House. 2007. Hlm. 51-52

²⁰ Ibid. Hlm. 52-56

²¹ Anwar, I. *Biaya Pendidikan dan Metode Penetapan Biaya Pendidikan*. *Mimbar Pendidikan*, No. 1 Tahun X, 1991. Hlm. 28—33.

²² Supriadi, *Satuan Biaya Pendidikan*, Hlm. 7

Apabila diperhatikan dengan seksama, biaya pendidikan atau pengeluaran sekolah sangat ditentukan oleh komponen-komponen biaya pendidikan yang jumlah dan porsinya berbeda-beda antara satu sekolah dengan sekolah lainnya. Berdasarkan pendekatan unsur biaya (*Ingridient Approach*), pengeluaran sekolah dapat di kategorikan ke dalam beberapa item pengeluaran yang berupa (a) pengeluaran untuk pelaksanaan pelajaran, (b) pengeluaran untuk tata usaha sekolah, (c) pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah, (d) kesejahteraan pegawai, (e) administrasi, (f) pembinaan teknis edukatif, dan (g) pendataan.²³

Secara lebih rinci pemanfaatan biaya pendidikan di sekolah digunakan untuk berbagai komponen yang berupa (a) gaji/ kesejahteraan pegawai (termasuk guru), (b) pembinaan profesi guru, (c) pengadaan alat-alat pelajaran, (d) pengadaan buku pelajaran, (e) perawatan/rehabilitasi gedung ruang belajar, (f) pengadaan sarana kelas, (g) pengadaan sarana sekolah, (h) pembinaan kegiatan ekstrakurikuler, dan (i) pengelolaan sekolah.²⁴

Pengeluaran biaya pendidikan di atas terlihat bahwa secara keseluruhan merupakan beban yang harus dikeluarkan oleh sekolah. Di sisi lain, terdapat juga biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh siswa atau keluarganya berkaitan dengan kegiatan sekolah dapat berupa (1) uang pangkal/uang masuk, (2) iuran rutin sekolah, (3) ulangan, (4) kegiatan ekstra-kurikuler, (5) praktikum, (6) buku-buku pelajaran/latihan/LKS, (7) buku dan alat-alat tulis, (8) tas sekolah, (9) sepatu sekolah, (10) transportasi ke sekolah, (11) pakaian seragam sekolah, (12) pakaian olah raga, (13) les di sekolah oleh gauru, (14) kursus/les di luar sekolah, (15) karya wisata, (16) sumbangan insidental, (17) uang saku/jajan siswa, dan (18) biaya lainnya.²⁵

²³ Fatah, *Ekonomi dan Pembiayaan....*, Hlm. 24

²⁴ Ibid. Hlm. 109

²⁵ Supriadi, *Satuan Biaya Pendidikan* Hlm. 192.

Dalam konsep pembiayaan pendidikan ada dua hal penting yang perlu dikaji atau dianalisis, yaitu biaya pendidikan secara keseluruhan (*Total Cost*) dan biaya satuan per siswa (*Unit Cost*). Biaya satuan di tingkat sekolah merupakan *Aggregate* biaya pendidikan tingkat sekolah, baik yang bersumber dari pemerintah, orang tua siswa, dan masyarakat yang dikeluarkan untuk penyelenggaraan pendidikan dalam satu tahun pelajaran. Biaya satuan per siswa merupakan ukuran yang menggambarkan seberapa besar uang yang dialokasikan ke sekolah-sekolah secara efektif untuk kepentingan murid dalam menempuh pendidikan.

Sebagaimana kita pahami bersama bahwa pelaksanaan otonomi daerah (pendidikan) telah memiliki dasar yang kuat. Beberapa aturan yang merupakan dasar pelaksanaan otonomi tersebut antara lain Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (UUPD 1999), Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai daerah otonom dll.

Konsep munculnya otonomi daerah (pendidikan) didasarkan pada pola pemikiran yang sangat baik, yaitu untuk menumbuh kembangkan inisiatif dan kreatifitas di tingkat daerah dan sekolah. Pemerintah daerah berani mengatasi kekurangan guru, sekolah memiliki inisiatif untuk meningkatkan mutu guru, daerah memiliki anggaran yang memadai untuk pengadaan buku, daerah berani meningkatkan kesejahteraan guru, dan masih banyak pemikiran yang mendasari munculnya otonomi daerah (sekolah). Namun satu hal yang perlu dipahami bahwa untuk membuat kebijakan yang selaras dengan kearifan lokal bukan merupakan hal yang mudah dilakukan. Sekolah dan daerah sangat memerlukan tenaga ahli yang sesuai untuk dapat meningkatkan dan mengembangkan sekolah (daerah). Selama ini sumber daya manusia yang ada sudah terbiasa melakukan kegiatan yang bersifat rutin.

Di kutif oleh Baedhowi mengatakan bahwa perlu ada semacam pemaparan secara komprehensif untuk menjelaskan konsep dasar dan implementasi kebijakan otonomi daerah bidang pendidikan. Konsep tentang

perlunya kebijakan otonomi pendidikan, dipandang perlu karena daerah lebih *Accountable* dan efektif dalam mengelola pendidikan. Berbeda jauh dibanding masa sentralisasi pendidikan, dengan birokrasi berbelit dan panjang. Keuntungan fundamental memakai sistem desentralisasi, yaitu jika keputusan berangkat dari daerah, keuntungannya daerah lebih mengetahui persoalan pendidikan di wilayahnya, ketimbang pusat.²⁶ Menurut Hamijoyo terdapat beberapa hal yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan desentralisasi pendidikan, yaitu (1) pola dan pelaksanaan manajemen harus demokratis; (2) pemberdayaan masyarakat harus menjadi tujuan utama; (3) peran serta masyarakat bukan hanya pada stakeholders, tetapi harus menjadi bagian mutlak dari sistem pengelolaan; (4) pelayanan harus lebih cepat, efisien, efektif, melebihi pelayanan era sentralisasi demi kepentingan peserta didik dan rakyat banyak; dan (5) keanekaragaman aspirasi dan nilai serta norma lokal harus dihargai dalam kerangka dan demi penguatan sistem pendidikan nasional.²⁷

Ada beberapa permasalahan yang mungkin akan dihadapi oleh sekolah dalam pelaksanaan otonomi pendidikan diantaranya berupa (1) kebijakan yang dibuat oleh pihak sekolah dihadapkan pada kondisi faktual yang harus segera direspon, (2) sekolah dituntut harus mengelola sendiri sumber daya yang diperlukan (mencari dan memanfaatkannya), (3) masing-masing sekolah harus memiliki sumber daya manusia yang benar-benar profesional, (4) sekolah perlu memiliki kecerdasan yang memadai untuk dapat menyusun kurikulum yang benar-benar menjawab kebutuhan, (5) penyelenggaraan sekolah harus berbasis pada sosial budaya lokal di mana sekolah bertempat, dan (6) sekolah harus benar-benar memiliki kecerdasan berwiraswasta dan berjiwa inovatif untuk mampu mengembangkan sekolah (satuan pendidikan).

²⁶ Baedhowi. *Kebijakan Otonomi Daerah Bidang Pendidikan: Konsep Dasar dan Implementasi*. 2007 (Online). <http://www.penapendidikan.com/mengupas-otonomi-pendidikan.html>.

²⁷ Hamijoyo, Santoso S. *Pola Otonomi Daerah yang Efektif dan Efisien untuk Diimplementasikan dalam Bidang Pendidikan*. Malang. FIP UNM, 1999. Hlm. 3.

KESIMPULAN

1. Biaya pendidikan merupakan salah satu komponen masukan *Instrumental* yang sangat penting bagi penyelenggaraan pendidikan. Hampir tidak ada upaya pendidikan yang mengabaikan peranan biaya, sehingga dapat dikatakan tanpa biaya, proses pendidikan tidak dapat berjalan dengan baik dan lancar.
2. Pembiayaan pendidikan dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003, pasal 46 (ayat 1) menyatakan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat. Kemudian (ayat 2) pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab menyediakan anggaran pendidikan sebagaimana diatur dalam pasal 31 ayat 4 Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pembiayaan pendidikan dibedakan menjadi dua jenis, yaitu biaya rutin (*Recurring Cost*) dan biaya modal (*Capital Cost*). *Recurring Cost* pada intinya mencakup keseluruhan biaya operasional penyelenggaraan pendidikan, seperti biaya administrasi, pemeliharaan fasilitas, pengawasan, gaji, biaya untuk kesejahteraan, dan lain-lain. Sementara *Capital Cost* atau sering pula disebut biaya pembangunan mencakup biaya untuk pembangunan fisik, pembelian tanah, dan pengadaan barang-barang lainnya yang didanai melalui anggaran pembangunan.
4. Di lihat dari sumber-sumbernya, biaya pendidikan pada tingkat makro berasal dari : Pendapatan Negara dari sektor pajak, pendapatan dari sektor non pajak, misalnya dari pemanfaatan sumber daya alam dan produksi nasional lainnya, keuntungan dari barang ekspor dan jasa, usaha negara lainnya, termasuk investasi saham pada perusahaan negara (BUMN), bantuan dari bentuk hibah (*Grant*) dan pinjaman luar negeri (*Loan*) baik dari lembaga-lembaga keuangan internasional maupun pemerintah.

Daftar Pustaka

- Anonim, *Memahami Paradigma Baru Pendidikan Nasional Dalam Undang-Undang RI*. Jakarta. Depag. 2003
- Baedhowi. *Kebijakan Otonomi Daerah Bidang Pendidikan: Konsep Dasar dan Implementasi*. 2007 (Online). <http://www.penapendidikan.com/mengupas-otonomi-pendidikan.html>,.
- Dedi Supriadi, *Satuan Biaya Pendidikan*. Bandung. Remaja Rosdakarya. 2004
- , *Satuan Biaya Pendidikan Dasar dan Menengah*. Rujukan bagi Penetapan Kebijakan Pembiayaan Pendidikan Pada Era Otonomi dan Manajemen Berbasis Sekolah. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2006
- G. Latchanna, dan Hussein, J. O. *Economics of Education*. New Delhi: Discovery Publishing House. 2007
- I. Anwar, *Biaya Pendidikan dan Metode Penetapan Biaya Pendidikan*. *Mimbar Pendidikan*, No. 1 Tahun X. 1991
- Mukhtar, dkk. *Sekolah Berprestasi*. Jakarta. Nimas Multima. 2003
- Martinis Yamin, *Profesionalisasi Guru dan Implementasi KTSP*. Gaung Persada Press Jakarta. 2007
- Nanang Fatah, *Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan*. Bandung. Remaja Rosdakarya. 2000
- Sudarwan Danim, *Visi baru Manajemen Sekolah : Dari Unit Birokrasi ke Lembaga Akademik*. Jakarta. Bumi Aksara. 2006
- Santoso S. Hamijoyo, *Pola Otonomi Daerah yang Efektif dan Efisien untuk Diimplementasikan dalam Bidang Pendidikan*. Malang. FIP UNM. 1999
- Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003, Sinar Grafika Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2007 tentang *Standar Nasional Pendidikan*